

DAFTAR PUSTAKA

1. Borins, Sandford. 2008. *Innovations in Government: Research, Recognition, and Replication*. Washington, D.C : Brookings Institution Press.
2. Damanpour, Fariborz, and Marguerite Schneider. 2009. Characteristics of Innovation and Innovation Adoption in Public Organizations: Assessing the Role of Managers. *Journal of Public Administration Research and Theory* 19(3): 495–522.
3. Homburg, Vincent, and Bekkers, Victor,. 2005. E-Government and NPA: A Perfect Marriage? Dalam “The Information Ecology of E-government: E-Government as Institutional and Technological Innovation in Public Administration”. Edited by Bekkers and Homburg. IOS Press Netherlands.
4. Osborne, S., dan Brown, L. (2011). *Innovation, Public Policy and Public Service Delivery in the UK : the Word that Would be King?*. International Journal of Public Administration.
5. Pollit, C dan Bouckaert, G. (2011). *Public Management Reform : A Comparative Analysis*. Oxford : Oxford University Press.
6. Pratchett, L., C. Durose, dan Vivien Lowndes. 2009. *Empowering Communities to Influence Local Decision Making: Evidence-based Lessons for Policy Makers and Practitioners*. London: Communities and Local Government Publications.
7. Rogers, Everett M. 2003. *Diffusion of Innovations*. New York: Free Press
8. Sangkala. 2013. *Innovative Governance : Konsep*.
9. Taliziduhu, N. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* : Pt Rineka Cipta.
10. Sedarmayanti. 2004. *Good governance : Mandar Maju*.
11. Sondang Siagian. 2014. *Administrasi Pembangunan : Pt Bumi Aksara*.

Peraturan Presiden :

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2012 Tentang Percepatan Pelaksanaan Perizinan Berusaha

Undang-Undang :

1. Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik. Jakarta : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Republik Indonesia. 2002. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Inovasi Publik. Jakarta
3. Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta : Badan Pemeriksa Keuangan.

Peraturan Pemerintah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pengalokasian sebagian pendapatan badan usaha untuk peningkatan kemampuan perekayasaan inovasi dan Difusi Teknologi. Jakarta : Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang *Online Single Submission*. Jakarta : Badan Penanaman Keuangan dan Modal.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Jakarta : Badan Pemeriksa Keuangan.

Peraturan Wali Kota :

1. Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Bekasi : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
2. Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2020 Tentang *Online Single Submission*. . Bekasi : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Keputusan Kepala Dinas :

Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bekasi Nomor:800/Kep.09-DISPARBUD/2019 Tentang Standar Operasional

Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Tim Teknis Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Bekasi : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi

Dictionary

Oxford English Dictionary (1973).

Rujukan Elektronik :

1. Kementrian Investasi/BPKM.Pemerintah siap melakukan pelayanan perizinan OSS. Melalui <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/pemerintah-siap-berlakukan-pelayanan-perizinan-oss>. (diakses 09/05/2020)
2. SK Menpan Nomor 81/1993 Tentang Pelayanan Publik. Melalui <https://sipp.menpan.go.id/sektor/kependudukan-dan-pencatatan-sipil/peraturan-terkait-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-di-indonesia>. (diakses 10/05/2020)

Jurnal :

1. Lembaga Amdinistrasi Negara Republik Indonesia, *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Jakarta, 2000
2. Junior P.M. 2016. *Pelayanan Publik (Studi kasus perizinan penanaman modal di BPPT Kota Semarang*. P.7
3. Putri L.D.M. 2018. *Efektivitas Inovasi Kebijakan Publik;Pengaruhnya pada kualitas pelayanan public di Indonesia*, p.4
4. Mulyadi. 2018. “Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Meningkatkan Investasi dan Pertumbuhan UMKM”. Kota Bekasi. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*. P.4-5.

